

DAFTAR PUSTAKA

- Bakari, R. I., Karamoy, H., & Lambey, R. (2022). Analisis Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado. *LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 941–948.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Hadari, N. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hunta, A. A., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2021). EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PADA DINAS KOPERASI KOTA BITUNG. *EMBA*, 9(3), 12.
- Kartono. (1980). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Penerbit ALUMNI.
- Kementerian Dalam Negeri. (n.d.). Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mamesah, D. . (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Menteri Keuangan. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Munandar, M. (2001). *Budgeting. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja* (1st ed.). Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

Nawawi, H., & Hadari, M. (1994). *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nazir, M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (n.d.). Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2018-2023.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. (n.d.).

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. (n.d.). Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

- Sedianingsih. (2010). *Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan*. Yogyakarta: Kencana.
- Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat 2021.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*.
- Swandana, & AA, N. (2017). Pengaruh kebijakan at cost terhadap alokasi anggaran perjalanan dinas. *Jurnal Penganggaran Sektor Publik, II*, 112–126.
- Syarifudin. (2005). *Administrasi Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarigan, V., Sriwiyanti, E., & Tumanggor, B. (2022). Penerapan SPAN Pada Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar. *Akuntansi, 6*(2), 6.